

Indeks Ketahanan Lingkungan sebagai Bukti Pembuatan Kebijakan: Sebuah Sosialisasi *Evidence-based Policy* di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir

Environmental Resilience Index as Evidence of Policy Making: An Evidence-based Policy Outreach in Lorok Village, North Indralaya District, Ogan Ilir Regency

Faisal Nomaini

Muhammad Husni Thamrin

Oemar Madri Bafadhal*

Department of Communication Sciences, Universitas Sriwijaya, Ogan Ilir Regency, South Sumatera, Indonesia

email:

madribafadhal@fisip.unsri.ac.id

Kata Kunci

Desa

Evidence-based policy

Indeks desa membangun

Indeks ketahanan lingkungan

Keywords:

Village

Evidence-based policy

Village developing index

Environmental resilience index

Received: November 2020

Accepted: May 2021

Published: June 2021

Abstrak

Para praktisi dan akademisi dihadapkan pada kebingungan tentang mengapa kebijakan publik gagal mencapai tujuannya dan mendapatkan resistensi dari masyarakat. Hal ini kemudian mendorong lahirnya konsep kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang dipercaya dan telah terbukti mampu meningkatkan keberhasilan kebijakan. Sayangnya, konsep ini belum menyentuh pada level pemerintah desa dan oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan konsep tersebut dan mempraktikkannya dengan mengambil studi kasus pada indeks ketahanan lingkungan sebagai salah satu penyusun indeks desa membangun (IDM). Kami mengambil studi kasus di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir karena beberapa alasan seperti tata kelola pemerintahan dan kesiapan mereka dalam menerima konsep baru ini. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah berupa model pelaksanaan EBP yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat karena ia dirumuskan bersama-sama antara kami sebagai akademisi dan masyarakat. Hasil lainnya adalah rekomendasi kebijakan untuk peningkatan ketahanan lingkungan dengan berfokus pada kriteria penyusun indeks.

Abstract

Practitioners and academics are faced with problems about why public policy fails to achieve its goals and is met with resistance from the public. This then led to the birth of an evidence-based policy (EBP) concept that is trusted and has been proven to increase policy success. Unfortunately, this concept has not yet reached the village government level. Therefore, this community service aims to socialize this concept and put it into practice by taking a case study on the environmental resilience index as one of the compilations of the village developing index (IDM). We took a case study in Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir for several reasons, such as governance and their readiness to accept this new concept. This community service is a model for implementing EBP by the needs and characteristics of the community because it is formulated jointly between us as academics and the community. Another result is policy recommendations for increasing environmental resilience by focusing on the criteria composing the index.



PENDAHULUAN

Kebijakan berbasis bukti (*Evidence-based Policy*, EBP) mendorong pemerintah dan para pengambil kebijakan untuk menggabungkan bukti berupa bukti-bukti

obyektif sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan (Gallego & Font, 2020; Head, 2008). *Evidence-based Policy* dengan kata lain adalah suatu kebijakan public yang berlandaskan bukti-bukti obyektif. Tujuan

utama dari aktivitas semacam itu adalah untuk meningkatkan reliabilitas dari berbagai pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan dan program (Craft & Howlett, 2012; Pawson, 2002a). *Evidence-based Policy* juga muncul sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh ideologi dan kepentingan politik dalam proses pengambilan kebijakan. Bukti yang dapat diintegrasikan dalam proses pembuatan kebijakan bervariasi dari riset, pengetahuan dan informasi, ide dan kepentingan, pertimbangan politik sampai dengan bukti-bukti ekonomi (Head, 2008).

Secara umum, pemerintah sebenarnya telah menggunakan bukti sebagai bahan pembuatan kebijakan. Sebagai contoh dalam pembuatan RPJMD terdapat berbagai macam data *time series* yang telah digunakan untuk melihat kinerja pemerintah selama lima tahun terakhir dan oleh karena itu, RPJMD dapat dikatakan sebagai salah satu produk kebijakan berbasis bukti (Febrian & Handrisal, 2018). Secara lebih detail, berbagai data baik yang sumbernya dari BPS ataupun data yang diproduksi oleh pemerintah sendiri telah mewarnai RPJMD. Sayangnya, dimensi politik dari RPJMD mungkin memainkan peranan yang lebih besar. Ini terlihat dari adanya visi dan misi kepala daerah yang menjadi landasan dalam perumusan strategi, kebijakan dan program (Mustain & Djaja, 2017).

Tantangan lain adalah bahwa bukti tidak serta merta dapat dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan. Ini selain dari kemauan dari para pembuat kebijakan juga karena sifat bukti ilmiah yang terkadang tidak mudah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan yang sifatnya teknis (Kusnanto, 2008). Beberapa limitasi dari bukti ilmiah dalam pembuatan kebijakan antara lain kecepatan (penelitian/penyediaan bukti membutuhkan waktu yang tidak singkat), pembalikan (keinginan publik terkadang berkebalikan dengan kebutuhan mereka), kedangkalan (masalah publik yang bervariasi

dan dinamis membuat hasil penelitian mungkin saja cepat berubah), kerahasiaan (beberapa bukti bersifat rahasia) dan ketidakpedulian pada bukti ilmiah (acuh tak acuh dari para pemangku kepentingan) (Asmara & Handoyo, 2015).

Dari kelima kendala tersebut, salah satu kendala yang mendesak untuk segera diselesaikan adalah ketidakpedulian pada bukti ilmiah atau seringkali disebut dengan *scientific ignorance*. Para politisi, pemerintah dan pembuat kebijakan, untuk mengurangi hal tersebut harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya dan urgensi bukti dalam pembuatan kebijakan. Berlarut-larut dan bertahun-tahun terjebak dalam masalah publik dapat dihindari dengan mengintegrasikan bukti dalam perumusan kebijakan. Dengan adanya kepedulian terhadap bukti ilmiah para pemangku kepentingan, sebenarnya, dapat memperoleh berbagai macam ide-ide yang lebih konkrit terarah dan membumi dan peka terhadap masalah publik.

Berbagai macam tingkatan pemerintah memerlukan pemahaman tentang konsep baru tersebut. Pemerintah pusat telah memulai dengan mengadakan berbagai macam kegiatan dan terdapat kemauan besar untuk memberikan anggaran penelitian baik kepada mitra ataupun lembaga non kementerian seperti LIPI dan BNPT (Syawie & Sumarno, 2015). Sementara itu, pemerintah daerah telah memiliki agensi penelitian dan pengembangan yang berdiri sendiri ataupun melekat pada agensi perencanaan pembangunan. Sementara itu, level pemerintah yang paling rendah yaitu pemerintahan desa masih asing dengan konsep tersebut dan tentunya menghadapi kendala yang lebih besar dalam menerapkan konsep semacam ini.

Sementara perhatian pemerintah terhadap desa meningkat yang dilihat dari alokasi anggaran besar-besaran melalui dana desa dan alokasi dana desa,

ketidaktepatan sasaran kebijakan dan program menjadi masalah yang menanti (Astuti *et al.*, 2020). Ini dikhawatirkan akan menjadi suatu fenomena pemborosan anggaran besar-besaran karena kebijakan dan program yang direncanakan ternyata gagal bertemu dengan masalah-masalah publik di desa (Damayanti & Syarifuddin, 2020; Purwaningrum & Short, 2018).

Oleh karena itu para pemangku kepentingan di desa perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya EBP dalam menjembatani masalah publik di desa dan kebijakan serta program yang tertuang dalam APBDes dan pada akhirnya cita-cita peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat dengan mudah diraih. Pentingnya hal tersebut mendorong kami untuk mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan tentang kebijakan berbasis bukti dengan mengambil kasus pada indeks ketahanan lingkungan di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir.

METODOLOGI

Kegiatan ini diawali dengan melakukan survei pra-kegiatan ke Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Pra-survei ditujukan untuk mendalami persoalan kualitas lingkungan dan EBP di desa ini sekaligus untuk dilakukan untuk menjangkau aspirasi masyarakat dan perangkat desa mengenai kebutuhan dan minat mereka untuk mendapatkan penguatan pemahaman yang menyeluruh mengenai topik Indeks Ketahanan Lingkungan dan EBP. Kegiatan ini diawali dengan melakukan survei pra-kegiatan ke Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan konsep sosialisasi dengan materi utama dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Secara khusus materi yang diambil dari peraturan ini adalah mengenai Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi) yang secara jelas telah diuraikan di peraturan ini. Selain itu kami juga secara khusus menggelar *focus group discussion* untuk menjangkau aspirasi masyarakat dan perangkat desa tentang EBP dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Sehubungan dengan kondisi Pandemi COVID-19 yang masih melingkupi aspek kehidupan masyarakat maka skema sosialisasi yang dilakukan akan menggunakan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar yang diberlakukan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir
Desa Lorok adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, Indonesia. Desa yang berjarak sekitar 41 km dari pusat Kota Palembang. Desa Lorok terpilih menjadi pemenang Lomba Desa tingkat Provinsi tahun 2013. Desa Lorok Juga memiliki cerita legenda seorang Raden Kuning yang memiliki bukti peninggalan berupa makam yang terletak di desa Lorok ini.

Di Desa ini telah tersedia berbagai macam sarana dan prasarana seperti tempat ibadah dan sarana olahraga, dan sarana kesehatan. Ditinjau dari tata kelola desa, terdapat beberapa permasalahan yang menjadikan pentingnya kegiatan sosialisasi EBP ini. Pertama adalah berkaitan dengan fungsi dari berbagai lembaga yang dibawah naungan Pemerintah Desa seperti Karang Taruna, PKK dan lain sebagainya. Masalah lain adalah minimnya program pemberdayaan masyarakat desa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masalah lain adalah masalah koordinasi dan kapabilitas serta kapasitas desa. Persoalan-persoalan tersebut meskipun telah diintervensi dari berbagai macam program dan

kebijakan dari pemerintah desa namun tetap muncul setiap tahunnya. Ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan yang berbasis bukti untuk menghubungkan masalah publik dengan kebijakan publik (Agustina *et al.*, 2018).

Indeks Ketahanan Lingkungan Desa

Indeks ketahanan lingkungan desa merupakan bagian dari indeks desa membangun (IDM). Indeks Desa membangun berperan sebagai evaluator dalam berbagai aspek untuk menentukan kemajuan dan kualitas suatu desa. Dimensi dari IDM sendiri terdiri dari tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial; Indeks Ketahanan Ekonomi; dan Indeks Ketahanan Lingkungan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2020). Ketiga indeks ini dirumuskan secara detil untuk merumuskan kompleksitas yang ada pada suatu desa ke dalam status kemajuan desa sehingga fokus dan lokus untuk memajukan suatu desa lebih terarah dan terpusat. Selain itu, alasan lain dari perumusan IDM adalah menghindari *moral hazard* dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan desa sehingga tidak mengulangi praktek-praktek pembangunan yang serba bias dan merugikan kehidupan desa. Dari ketiga dimensi tersebut, salah satu indeks yang harus dipenuhi oleh suatu desa adalah Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2019). Indeks ini erat kaitannya dengan kualitas kehidupan lingkungan dalam arti yang menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada persoalan lingkungan rumah masyarakat desa saja.

Dalam konteks desa maka lingkungan dapat diartikan sebagai keseluruhan kondisi ekologi yang berada pada desa tersebut meliputi kehidupan manusia, kualitas tanah, kualitas air, dan kualitas udara dan termasuk kualitas keberadaan hayati yang berfungsi sebagai penopang kehidupan masyarakat desa. Tabel I

menunjukkan komponen dari penyusun indeks ketahanan lingkungan.

Tabel I. Dimensi dan Indikator dalam Indeks Ketahanan Lingkungan

Dimensi	Indikator
Kualitas lingkungan	1. Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan 2. Terdapat sungai yang terkena limbah.
Potensi Rawa Bencana	1. Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan 2. Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

Adapun tujuan dari penyusunan indeks ini adalah untuk mendukung upaya pemerintah terutama pemrintag desa dalam mengatasi pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Sementara itu secara lebih spesifik terdapat amanat dari indeks ini yang sejalan dengan tujuan dari EBP yaitu Untuk menjamin penyediaan data dan informasi yang akurat, tepat dan akuntabel, perlu dilakukan pengelolaan Indeks Desa Membangun; Indeks Desa Membangun dikelola oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Direktorat Pelayanan Sosial Dasar pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Pendayagunaan Indeks Desa Membangun lebih lanjut dapat dilakukan dengan:

1. Memperkuat hasil analisis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan jenis indeks yang lainnya, seperti indeks keadilan gender, indeks demokrasi, indeks kapasitas dan tata kelola pemerintahan yang secara tegas dengan lokus Desa;
2. Penentuan peringkat Desa dalam keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Bahan advokasi di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Desa dalam mendorong keberpihakan kebijakan dan anggaran yang dapat meningkatkan kemandirian Desa;
4. Digunakan sebagai alat evaluasi terhadap proses

- perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
5. Merumuskan fokus dan lokus pembangunan desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan Desa bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada dalam Indeks Desa Membangun (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2019).

Materi Sosialisasi: Kebijakan berbasis bukti

Kebijakan publik sangat penting bagi organisasi pemerintahan karena ia berhubungan dengan hajat hidup masyarakat yang merupakan kelompok sasaran dari berbagai kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan publik yang dirumuskan harus menggambarkan secara obyektif masalah yang dihadapi agar intervensi yang dilakukan tidak melenceng dari masalah itu sendiri. Selain itu EBP juga penting untuk merumuskan desain kebijakan agar sesuai dengan karakteristik masalah dan keinginan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan publik. Bukti dalam dunia akademis adalah lambang dari imparialitas yang merupakan syarat dalam menghasilkan produk yang berkualitas, kebijakan sebagai salah satunya (Pawson, 2002b; Young *et al.*, 2002). Pengertian lain dari bukti adalah pendekatan model rasional yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah dengan berfokus pada penggalan penyebab masalah dan pengetahuan ilmiah tentang hubungan sebab akibat yang terjadi dalam masalah.

Dalam perjalanannya untuk menjadi bahan pembuatan kebijakan, bukti yang tersedia harus diterjemahkan menjadi bahasa-bahasa kebijakan. Terdapat beberapa alternatif langkah untuk melaksanakan hal tersebut. Pertama adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah desa terutama untuk mengetahui kapasitas pemanfaatan produk penelitian untuk kebijakan publik. Kedua adalah dengan merumuskan rancangan dan melakukan penelitian dengan strategi yang tepat sesuai dengan

kebutuhan dari pemerintah dan masyarakat desa. Terakhir adalah dengan melakukan penyebaran informasi hasil riset yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (Head, 2010; Young *et al.*, 2002). Beberapa manfaat dari adanya pengintegrasian bukti obyektif ke dalam kebijakan antara lain: Pertama adalah membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi masalah publik dan penyebab utama dari masalah-masalah publik tersebut. Selanjutnya, EBP dapat pula membantu pemangku kepentingan untuk mendesain kebijakan dan alternatif-alternatifnya berdasarkan kapasitas organisasi pelaksana kebijakan. Manfaat lainnya adalah untuk menyusun serangkaian instrument untuk menyelidiki dampak dan merupakan input dari program kedepannya. Keempat adalah untuk memantau pelaksanaan program dan kebijakan, mengukur biaya, manfaat dan kinerja kebijakan serta kepekaan kebijakan untuk diterapkan dalam situasi yang berbeda. Terakhir adalah, dalam jangka panjang dapat digunakan untuk menilai biaya dan kinerja yang dihasilkan oleh program-program yang berbasis bukti (Asmara & Handoyo, 2015).

Berkaitan dengan pemanfaatan bukti untuk pembuatan kebijakan, kami mengidentifikasi beberapa alternatif bukti yang dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan kebijakan yang dapat mengarahkan desain serta alokasi sumber daya baik manusia teknologi maupun anggaran. Tabel II berisi berbagai macam produk yang dapat dimanfaatkan untuk urusan ini dan tentunya masih dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa juga dapat mengembangkan instrument sendiri yang berlandaskan pada kebutuhannya.

Secara umum, bukti-bukti ilmiah dapat diakses oleh Pemerintah Desa Lorok dari BPS Kabupaten Ogan Ilir, selain itu beberapa data dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir juga dapat diakses untuk menjadi bukti.

Beberapa kementerian juga bahkan memiliki data yang basisnya adalah desa. Ini juga dapat mereka manfaatkan untuk menjadi landasan dalam membuat kebijakan agar lebih tepat sasaran.

Tabel II. Bukti yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Desa Lorok

Jenis Bukti	Sumber	Masalah publik
Indeks Desa Membangun	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pembangunan desa
Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan Banyaknya Korban Jiwa akibat Bencana Alam Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Bencana Alam	BPS Kabupaten Ogan Ilir	Transportasi penduduk Bencana
Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Bencana Alam	BPS Kabupaten Ogan Ilir	Bencana
Keberadaan Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam	BPS Kabupaten Ogan Ilir	Bencana
Jumlah dan Kepadatan Penduduk	BPS Kabupaten Ogan Ilir	Pendendaliaan penduduk dan keluarga berencana
Jumlah penduduk miskin	BPS Kabupaten Ogan Ilir	Pengentasan kemiskinan
Kelahiran Dan Kematian Anak	BPS Kabupaten Ogan Ilir	Kesehatan Ibu dan anak

Kebijakan berbasis Bukti Desa Lorok

Sebelum jauh berbicara mengenai arah pembangunan ketahanan lingkungan di Desa Lorok, kami terlebih dahulu melakukan *focus group discussion* yang berisi tentang bagaimana memanfaatkan data untuk kebijakan. Kami mengajak para pemangku kepentingan di Desa Lorok untuk bersama-sama membuat bagan tentang bagaimana aktivitas ini dimulai dan berkontribusi pada pembuatan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

Gambar 1 berisi alur pembuatan kebijakan berbasis bukti sebagai hasil dari FGD antara tim pengabdian masyarakat dengan pemangku kepentingan di Desa Lorok. Secara umum, terdapat delapan tahapan yang

harus dilalui untuk menciptakan kebijakan berbasis bukti. Langkah ini dimulai dengan melakukan inisiasi kebijakan atau program. Inisiasi program mewajibkan adanya evaluasi dan peninjauan dari program sebelumnya dan program lain yang sama namun diterapkan di daerah lain untuk belajar kekurangan dan kesuksesan dari program tersebut.



Gambar 1. Alur pembuatan kebijakan berbasis bukti

Inisiasi kebijakan juga mengharuskan adanya pelibatan masyarakat yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengumpulkan bukti melalui penelitian. Masyarakat juga dapat memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang diinisiasi. Keduanya menghasilkan perencanaan kebijakan. Sumbangsih penelitian dan masyarakat juga dapat dilakukan untuk bersama-sama menyusun kriteria evaluasi kebijakan. Kriteria ini bersama sama dengan perencanaan kebijakan kemudian dibuat menjadi suatu kebijakan. Masyarakat juga dapat menyampaikan usulnya terkait dengan proses ini. Kebijakan tersebut tentunya harus diseminasikan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Setelah kebijakan diimplementasikan, kebijakan kemudian dilakukan upaya untuk menerjemahkan hasilnya berdasarkan pada kriteria yang disusun pada saat proses penilaian keberhasilan kebijakan. Hasil ini kemudian masuk dalam proses evaluasi dan peninjauan yang juga melibatkan masyarakat dan penelitian. Ini kemudian kembali ke fase awal yaitu inisiasi kebijakan. Hasil dari evaluasi dan peninjauan akan menjadi landasan dalam kebijakan selanjutnya.

Studi Kasus: Indeks Ketahanan Lingkungan Desa Lorok

Sebagaimana indeks ketahanan lingkungan merupakan bagian dari Indeks Desa Membangun (IDM). Secara umum, Tabel III berisi data IDM dari tahun 2019-2020. Dalam dua tahun terakhir, Desa Lorok berstatus sebagai desa berkembang. Jika dilihat lebih detail, ia bergerak turun dari 0,6552 di tahun 2019 menjadi 0,6232 di tahun 2020, turun 5,13%.

Tabel III. Bukti yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Desa Lorok

Status IDM	Tahun	Skor	Peningkatan (+) / Penurunan (-)
Desa Berkembang	2019	0,6552	-
Desa Berkembang	2020	0,6232	-5.13%

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2020

Berasarkan hasil studi dengan mempertimbangkan nilai IDM, termasuk di dalamnya adalah Indeks Ketahanan Lingkungan. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel IV. Secara umum, rekomendasi kebijakan dibuat berdasarkan dimensi dan indikator penilaian dalam Indeks Ketahanan Lingkungan yang langsung menyorot pada pokok permasalahan dan rekomendasi dibuat untuk memecahkan masalah.

Dimensi kualitas lingkungan hidup, kami merekomendasikan Desa Lorok untuk mengurangi Pengurangan pencemaran air di Desa, pencemaran tanah di Desa, pencemaran udara di Desa, sungai yang terkena pembuangan limbah. Sebagai contoh, masyarakat dapat melakukan gerakan 3R yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Kemudian untuk dimensi kedua yaitu Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana, rekomendasinya adalah untuk membangun masyarakat tangguh bencana dan membuat Fasilitas Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Peringatan Dini Bencana, Fasilitas Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Perlengkapan Keselamatan, dan Fasilitas Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Jalur Evakuasi.

Tabel IV. Rekomendasi kebijakan pembangunan ketahanan lingkungan

Dimensi / Indikator	Rekomendasi
<i>Kualitas lingkungan</i>	Pengurangan pencemaran air di Desa, pencemaran tanah di Desa, pencemaran udara di Desa, sungai yang terkena pembuangan limbah
1. Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan	
2. Terdapat sungai yang terkena limbah.	
<i>Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana</i>	1. Pembangunan masyarakat tangguh bencana
1. Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan	2. Pembuatan Fasilitas Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Peringatan Dini Bencana, Fasilitas Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Perlengkapan Keselamatan, dan Fasilitas Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Jalur Evakuasi
2. Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).	

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti, dengan mengambil studi kasus pada Indeks Ketahanan Lingkungan sebagai bahan dari EBP. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini kami memperkerjakan metode sosialisasi dan FGD. Sosialisasi dimaksudkan untuk menjelaskan EBP dan Indeks Ketahanan Lingkungan sementara dalam FGD kami bersama-sama menyusun langkah-langkah pengintegrasian bukti dalam pembuatan kebijakan dan pencarian rekomendasi kebijakan dalam kasus indeks ketahanan lingkungan. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah berupa model pelaksanaan EBP yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat karena ia dirumuskan bersama-sama antara kami sebagai akademisi dan masyarakat. Hasil lainnya adalah rekomendasi kebijakan untuk peningkatan ketahanan lingkungan dengan berfokus pada kriteria penyusunan indeks. Beberapa hal yang kami rekomendasikan berkaitan dengan hal ini antara lain: Pembangunan masyarakat tangguh bencana, dan Pembuatan Fasilitas Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Peringatan Dini

Bencana, Fasilitas Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Perlengkapan Keselamatan, dan Fasilitas Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Jalur Evakuasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Sriwijaya yang telah memberi dukungan finansial terhadap pengabdian ini.

REFERENSI

- Agustina, S., Yusuf, S., Fajarica, S.D. 2018. Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Unsur Pimpinan Desa Dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa Di Desa Lorok Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*. 6(3):644-652. <https://doi.org/10.37061/jps.v6i3.7014>
- Asmara, A.Y., Handoyo, S. 2015. Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Studi Pada Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia. *STI Policy and Management Journal*. 13(1):38-57. <http://dx.doi.org/10.14203/STIPM.2015.38>
- Astuti, E., Murwani, J., Sugiharto. 2020. Pelatihan Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan Dana Desa Pada MGMP Kabupaten Madiun. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 4(2):214-221. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.3593>
- Craft, J., Howlett, M. 2012. Policy formulation, governance shifts and policy influence: location and content in policy advisory systems. *Journal of Public Policy*. 32(2):79-98. <https://doi.org/10.1017/S0143814X12000049>
- Damayanti, R.A., Syarifuddin, S. 2020. The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*. 30(5):624-634. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151>
- Febrian, R.A., Handrisal, H. 2018. Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau). *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 3(1):1-35.
- Gallego, I., Font, X. 2020. Changes in air passenger demand as a result of the COVID-19 crisis: using Big Data to inform tourism policy. *Journal of Sustainable Tourism*. 29(9):1470-1489. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1773476>
- Head, B.W. 2010. Evidence-based policy: Principles and requirements. In *Strengthening evidence-based policy in the Australian Federation*. 1(2):13-26. Melbourne: Productivity Commission.
- Head, B.W. 2008. Three Lenses of Evidence-Based Policy. *Australian Journal of Public Administration*. 67(1):1-11. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00564.x>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2020. *Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM): Provinsi Kabupaten Kecamatan*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2019. *Status Indeks Desa Membangun (IDM): Provinsi Kabupaten Kecamatan Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Kusnanto, H. 2008. Kebijakan Kesehatan Masyarakat Berbasis Bukti. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*. 11(1):2-4
- Mustain, L.H.B., Djaja, K. 2017. The burden of regional development planning in indonesia: A case study of discrepancies between land use and spatial planning document in banten province. *WIT Transactions on Ecology and The Environment*. 226(1):253-261. <http://doi.org/10.2495/SDP170221>
- Pawson, R. 2002a. Evidence-based Policy: In Search of a Method. *Evaluation*. 8(2):157-181. <https://doi.org/10.1177/1358902002008002512>
- Pawson, R. 2002b. Evidence-based Policy: The Promise of 'Realist Synthesis'. *Evaluation*. 8(3):340-358. <https://doi.org/10.1177/135638902401462448>

- Purwaningrum, F., Short, S.D. 2018. Epistemic layers in development planning: A case study of the health sector in the Gunungkidul District, Indonesia. *International Journal of Health Planning and Management*. **33**(4):1200-1210. <https://doi.org/10.1002/hpm.2607>
- Syawie, M., Sumarno, S. 2015. Kebijakan Berbasis Ilmu Pengetahuan. *Sosio Informa*. **1**(1):79-90. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.92>
- Young, K., Ashby, D., Boaz, A., Grayson, L. 2002. Social Science and the Evidence-based Policy Movement. *Social Policy and Society*. **1**(3):215-224. <http://doi.org/10.1017/s1474746402003068>